

**MODEL PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA
(Studi tentang Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung)**

***THE MODEL OF POLITICAL PARTICIPATION OF BEGINNERS
(Study of The Election of Regional Heads Bandung City)***

Yogi Gumilar S.A

Alumnus Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana
yogigumilar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung sehingga peneliti mencoba untuk menganalisis apa yang ada dalam partisipasi politik pemilih pemula di Kota Bandung pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018. Berdasarkan latar belakang maka peneliti mengidentifikasi masalah yaitu Bagaimana Partisipasi Politik Pemilih Pemula dan Bagaimana Model Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah 2018. Peneliti menganalisis Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018 dengan pendekatan teori Milbrath dalam Maran (2007:156) menyebutkan dua faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, bahwa adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang dimana di dalam faktor pendukung terdapat lima unsur di antaranya adanya perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik. Dari dua faktor utama yang dikatakan Milbrath, terdapat faktor penghambat juga yang mendorong orang tidak berpartisipasi politik, unsur yang ada dalam faktor penghambat tersebut yaitu kebijakan induk yang selalu berubah, pemula yang otonom, dan dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk mensukseskan. Dari pendekatan teori tersebut penulis merumuskan proposisi yaitu Partisipasi Politik Pemilih Pemula akan berlangsung optimal jika dilandaskan dari faktor perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik dengan demikian partisipasi aktif akan lebih besar dari partisipasi pasif dan Model Politik Pemilih Pemula akan berbanding lurus dengan dominannya faktor pendukung dari pada faktor penghambat partisipasi politik. Metode yang menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan sesuatu cara apa adanya sesuai keadaan yang terjadi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian berupa temuan baru yaitu pengembangan model Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018, pengembangan model ini dapat menjadi pilihan untuk mengatasi Partisipasi Politik Pemilih Pemula.

Kata kunci: Model Partisipasi Pemilih Pemula di Kota Bandung.

ABSTRACT

This study aims to find out the Political Participation of Beginner Voters in the Regional Head Election of Bandung so that the writer tries to analyze what exists in the political participation of beginner voters in the Regional Head Election of Bandung in 2018. Based on

the background, the writer identifies the problems: (1) how is political participation beginner voters and how is the model of political participation of beginner voters in 2018 Regional Head Election. The writer analyzes the political participation of beginner voters in 2018 Regional Head Election in Bandung using the theory of Milbrath in Maran (2007: 156) mentioning two main factors that encourage people to participate in politics; they are supporting factors and inhibiting factors. The supporting factors include the presence of political incentives, personal characteristics, social characteristics, political situation or environment, and political education. Of the two main factors that Milbrath says, there are also inhibiting factors that encourage people not to participate in politics. They are the constantly unstable parent policies, autonomous beginners, and less support from the parent organization to succeed. From the theoretical approach, the writer formulates a proposition namely Beginner Voter Political Participation that will take place optimally if it is based on political stimulus factors, personal characteristics, social characteristics, political situation or environment, and political education. So, active participation will be greater than passive participation and the model of political beginner voters will be directly proportional to the dominance of supporting factors rather than the inhibiting factors of political participation. The method used in this study is descriptive research method through a qualitative approach, namely by describing something as it is in accordance with the circumstances that occur. The data collection techniques in this study are literature studies, observation, interviews, and documentation. The result of this study is a new finding; that is the development of the model of political participation of beginner voters in 2018 Bandung Regional Head Election. The development of this model can be an option to overcome the political participation of beginner voters.

Keywords: *Model of Beginner Voter Participation in Bandung City.*

1. Pendahuluan

Demokrasi merupakan kegiatan yang dilakukan seluruh warga negara untuk mencapai keinginan bersama agar terciptanya masyarakat yang madani. Ada beberapa hal untuk mencapai keinginan bersama tersebut yaitu salah satunya dengan pemilihan umum pejabat negara yang dilakukan oleh warga negara. Ada pun pendapat para ahli yang berpendapat mengenai demokrasi. Fuady (2010:2) berpendapat demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang publik (*public sphere*) maupun melalui

wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat. Menurut Dhal (1978) seperti dikutip Budi Kurniadi (2019): "Furthermore to guarantee the democratic process the people's political participation needs to be guaranteed though the opportunity to : (1) Formulate your own preferences or interests; (2) Informing about his preferences to fellow the citizens and to the government through individual and collective actions; (3) Make sure that the interests are considered equqlity in the government's decision making process, meaning that they are not discriminatory based on the content and origin's.[1]

Dari pendapat ahli tersebut bahwa demokrasi yang melibatkan seluruh warga

negara harus dijamin dalam memilih pelaksana Negara.

Salah satu terwujudnya demokrasi dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota, Selain itu, pilkada juga dapat diartikan sebagai Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota. Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan Pemilihan Kepala Daerah pada khususnya, Peran serta masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu syarat terwujudnya nilai-nilai demokrasi, peran serta masyarakat dalam hal ini ialah partisipasi politik, dimana partisipasi politik masyarakat sangatlah penting karena dengan berpartisipasi masyarakat dapat mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat itu sendiri di daerah yang mereka tempati.

Setiap masyarakat berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Masyarakat yang memiliki hak suara ini memiliki kriteria dimulai dari usia 17 tahun hingga lansia dengan syarat sehat jasmani maupun

rohani. Masyarakat yang memiliki hak suara terbagi menjadi dua generasi, generasi muda diklasifikasikan dari mulai rentan umur 17 tahun hingga 35 tahun dan generasi tua dimulai rentan umur 35 hingga lansia, melalui 2 generasi inilah dapat menggambarkan pandangan politik dan sikap politik yang mungkin berbeda, hal ini dapat terjadi karena pengalaman politik juga pendidikan politik yang dialami oleh dua generasi tersebut. Sebagai contoh pemilih pemula yang merupakan generasi muda dengan usia rata-rata 17-21 tahun yang sudah memiliki hak suara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dalam hal ini pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan kepala daerah Kota Bandung. Meskipun pemilih pemula telah mendapatkan hak untuk memilih, bila dilihat dari sudut pandang lain pemilih pemula secara umum belum memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait politik. Bentuk sikap politik dari pemilih pemula dapat dilihat dari sikap politiknya secara aktif dengan mendatangi lokasi TPS atau peduli dengan dunia politik.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, menurut Budi Kurniadi (2018), generasi muda dan politik adalah dua elemen atau bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan suatu bangsa, karena dari sisi itulah generasi muda dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional karena tidak selamanya generasi sekarang terus bertahan, sehingga eksistensi generasi muda diharapkan dapat membawa perubahan berdemokrasi ke arah yang lebih baik".[2]

Kepedulian yang ditunjukkan oleh pemilih pemula dalam hal ini belum tentu berkaitan dengan penggunaan hak suara. Sedangkan pemilih pemula yang bersikap secara pasif menunjukkannya dengan cara tidak mendatangi lokasi TPS dan tidak peduli dengan dunia politik. Kota Bandung salah satu wilayah yang ikut serta pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, dengan suhu politik yang terbentuk

melalui media cetak, media elektronik dan media sosial dengan cukup hangat pada tahun-tahun sebelumnya di Kota Bandung namun tidak didukung dengan pendidikan politik pada masyarakat khususnya pada pemilih pemula, dampak tersebut mengakibatkan masyarakat khususnya pemilih pemula secara pasrtispasi kurang makasimal, hal ini dapat terlihat pada hasil

Pilkada 2013 dan Pilkada 2018 dengan suara tidak sah dan suara golput (suara yang tidak digunakan) yang masih ada. Bisa jadi suara tidak sah dan suara golput (suara yang tidak digunakan) adalah suara mayoritas dari pemilih pemula. Berikut adalah hasil suara Pilkada 2013 dan Pilkada 2018;

Tabel 1.1
Suara PILKADA Kota Bandung 2013 dan 2018

TAHUN	DPT (Daftar Pemilih Tetap)	PEMILIH PEMULA	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	SUARA GOLPUT	TOTAL SUARA
2013	1.657.406 Jiwa	436.133 Jiwa	959.715 Suara	43.492 Suara	654.199 Suara	1.657.715 Suara
2018	1.704.341 Jiwa	483.068 Jiwa	1.266.830 Suara	39.042 Suara	398.475 Suara	1.704.341 Suara

Sumber: KPU Kota Bandung 2019 dan BPS Kota Bandung 2019

Dengan total suara tidak sah dan suara yang tidak digunakan (golput) yang masih cukup banyak menimbulkan pertanyaan, pertanyaan sebagai berikut;

1. Faktor pendorong partisipasi apa yang membuat partisipasi politik masyarakat khususnya pemula agar dapat maksimal.
2. Faktor penghambat partisipasi apa yang membuat partisipasi politik masyarakat khususnya pemula menjadi tidak maksimal.

Selain suara masyarakat umum, Peran bahkan suara anak muda atau bisa disebut pemilih pemula menjadi menarik untuk dibahas khususnya mengenai partisipasi pemilih pemula dalam rangkaian pesta demokrasi yaitu Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung, Bedasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam laporan penelitian ilmiah dengan bentuk skripsi yang

berjudul: "Model Partisipasi Pemilih Pemula (Studi Kasus tentang Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung)".

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada topik yang dipilih, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandung 2018?
2. Bagaimana Model Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandung 2018?

3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penulisan laporan ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota

Bandung 2018 Sementara tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandung 2018
2. Untuk mengetahui Bagaimana Model Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandung 2018.

4. Tinjauan Pustaka

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warganegara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warganegara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warganegara biasa dibagi menjadi dua yaitu: mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik. Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Jumlah orang yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu, seperti memberikan suara dalam pemilu, besar sekali. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pemimpin dari partai atau kelompok kepentingan.

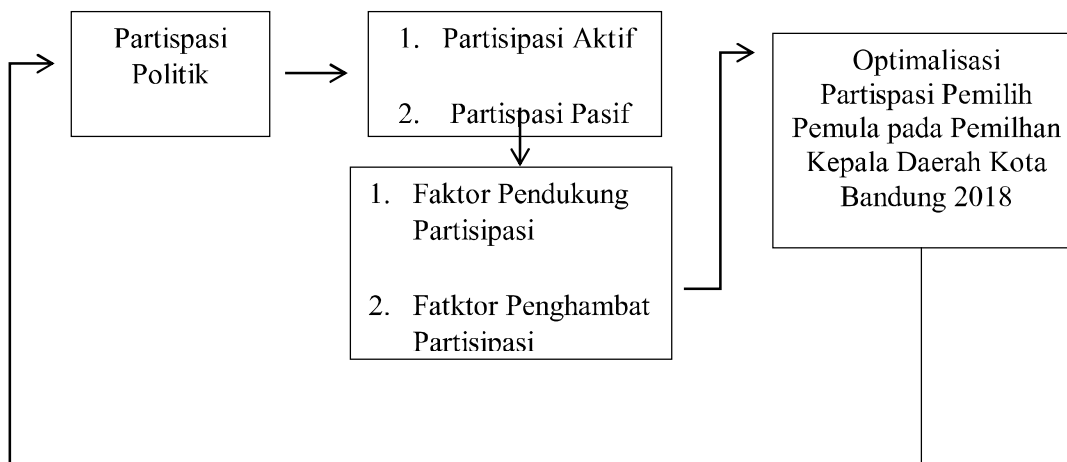
Partisipasi Politik Pemilih Pemula memiliki pengaruh yang cukup penting terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018. Karena suara pemilih pemula cukup berpengaruh untuk memenangkan Pilkada Kota Bandung 2018. Dalam kerangka pemikiran, peneliti

mencoba mengungkapkan beberapa teori partisipasi politik yang berkaitan dengan masalah penelitian. Definisi partisipasi politik Menurut para ahli ialah sebagai berikut, untuk melakukan kegiatan partisipasi politik dan menghindari berbagai kemungkinan rendahnya partisipasi politik yang terjadi terdapat faktor-faktor partisipasi politik yang diungkapkan oleh Milbrath dalam Maran (2007:156) menyebutkan dua faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, bahwa adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang dimana didalam faktor pendukung terdapat lima unsur diantaranya adanya perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik. Dari dua faktor utama yang dikatakan Milbrath, terdapat factor penghambat juga yang mendorong orang tidak berpartisipasi politik, unsur yang ada dalam faktor penghambat tersebut yaitu kebijakan induk yang selalu berubah, pemula yang otonom, dan dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk mensukseskan.

Dari pernyataan di atas, penulis mencoba membentuk suatu konsep yang berisikan tentang batasan-batasan penelitian yang akan dilaksanakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Politik merupakan salah satu sikap politik dalam demokrasi yang dilakukan oleh semua warga negara dalam menjalankan konstitusi.
2. Partisipasi merupakan hal terpenting karena berdampak kepada kemajuan suatu negara khususnya Negara yang menganut sistem demokrasi.
3. Komisi Pemilihan Umum dan Partai politik memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan yang menggairahkan partisipasi politik, jalannya partisipasi politik khususnya di tingkat pemilih pemula sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara.

Gambar 2.1.
Paradigma Penelitian



4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang-dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data".Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin lebih memahami dinamika partisipasi politik pemilih pemula di lapangan yang terjadi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandung 2018 di Kota Bandung. Maka dari hal tersebut peneliti tidak dapat mengandalkan data statistik yang tersedia, tetapi harus adanya wawancara yang mendalam terkait dengan fenomena lapangan yang terjadi baik dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung maupun pihak-pihak terkait dengan Pemilihan

Kepala Daerah Kota Bandung 2018. Hal ini tidak terlepas dari adanya peran partai politik, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan media sosial. Maka dari itu, peneliti tidak hanya melihat data yang tersedia di pemerintah atau pun melakukan wawancara dengan pihak pemerintah, tetapi peneliti harus melakukan wawancara dengan pelaku politik praktis tersebut agar kompleksitas masalah yang ada dapat terurai secara baik.

5. Hasil Penelitian dan Analisis

Kota Bandung terdiri dari beberapa wilayah diantaranya Bandung Utara, Bandung Tengah, Bandung Timur, Bandung Barat dan Bandung Selatan. Kota Bandung memiliki 30 Kecamatan dan memiliki 151 Kelurahan dengan total penduduk mencapai 2.505.254 Jiwa dengan Luas wilayah 167,67 km dan sebaran penduduk 14.341 jiwa/km. Kelompok usia 15-24 tahun merupakan kelompok usia dengan persentase terbesar di antara kelompok umur lainnya, peneliti hanya membatasi objek penelitian pada 5 wilayah Di Kota Bandung dan subjek penelitian kepada Pemilih Pemula.

Komisi Pemilihan Kota Bandung mencoba menysasar Pemilih Pemula pada

Pemilihan Kepala Daerah serentak khususnya Pada Pemilihan Kepala daerah Kota Bandung pada tahun 2018 agar para Pemilih Pemula dapat berpartisipasi dengan baik dan menggunakan hak pilihnya, melihat angka pemilih pemula yang cukup banyak pada tahun 2018. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung mensosialisasikan kepada masyarakat umumnya dan khususnya pada Pemilih Pemula dengan melakukan *road show* kepada semua lapisan masyarakat, untuk menysasar Pemilih Pemula Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung melakukan Road Show di beberapa Sekolah dan beberapa Universitas.

Selaras dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung Melalui Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki program-program diantaranya sebagai berikut:

1. Program Partispasi Pemilih.
2. Program Pendidikan Politik Menjelang Pemilu.
3. Program Menciptakan Kondisi yang Aman dan Kondusif menjelang Pemilu.

Dengan harapan masyarakat dan berpartisipasi secara baik dan aktif dalam Pemilihan Umum, khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018. Selain Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung melalui Kestuan Bangsa dan politik, Partai politik tingkat Kota Bandung pun melakukan hal serupa dengan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung, hanya saja Partai politik melakukannya dengan praktis dan menjelang masa kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung pada tahun 2018.

Besar harapan apa yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung dan Partai Poltik Tingkat Kota Bandung agar masyarakat khususnya Pemilih Pemula dapat berpartisipasi dengan baik, namun

sangat disayangkan dalam pelaksanaannya program dan kegiatan dilakukan oleh instansi tersebut tidak berbanding lurus dengan yang diharapkan. Pasalnya, suara tidak sah dan suara tidak terpakai masih cukup banyak yang bisa jadi suara tersebut berasal dari pemilih pemula. Meski Pemilu masih menjadi hak warga negara untuk memilih dan bukan menjadi kewajiban warga negara untuk memilih, dengan sosialiasi yang kurang merata dan waktu yang tidak cukup lama membuat masyarakat khususnya pemilih pemula tidak tahu bahkan tidak peduli terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung pada tahun 2018.

Dari fakta yang telah diuraikan di atas, Partispasi Politik dari Pemilih Pemula harus diketahui agar terciptanya pembangunan politik yang baik dan berujung pada tingkat partisipasi yang baik puladikalangan pemilih pemula. Melalui metode tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung dan Parta Politik tingkat Daerah Kota Bandung dapat mengkaji apa-apa yang harus dilakukan berupa program maupun kegiatan agar tepat sasaran dan nilai partisipasi politik pemula sesuai dengan harapan. Dalam proses demokrasi yang dalam hal ini Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandung, tentunya Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung dan Parta Politik tingkat Daerah Kota Bandung harus memiliki target berupa capaian-capaian yang berjangka dan berkelanjutan. Target berupa capaian-capaian berfungsi sebagai titik acuan dasar dalam melaksanakan pembangunan politik dikalangan pemilih, khususnya dikalangan pemilih pemula. Aturan perundang-undangan yang berlaku berfungsi sebagai landasan atau panduan pembangunan politik dan proses demokrasi dalam hal ini Pemilihan Umum tersebut dilaksanakan, dan kewenangan berfungsi sebagai legalitas tim instansi terkait dalam melakukan pembangunan

politik dan proses demokrasi dalam hal ini Pemilihan Umum di Kota Bandung.

Data dan informasi yang didapat untuk penelitian ini berasal dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, Partai Politik yang mengetahui dan mengalami secara langsung hal-hal apa saja yang terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018. Ketiga pihak tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam Partisipasi Politik Pemilih Pemula, karena merupakan media untuk dapat mewujudkan partisipasi politik pemula yang baik dan menjalankan pembangunan politik dan proses demokrasi dalam hal ini Pemilihan umum secara optimal. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung bertugas untuk melaksanakan dan bertanggung jawab pesta demokrasi melalui proses Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung, sementara Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas dan berfungsi untuk melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan. Selain kedua pihak tersebut, terdapat pula Partai Politik yang berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, menyerap dan penyalur aspirasi politik masyarakat, partisipasi politik warga negara dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.

Dalam rangka mengatasi masalah yang berkaitan dengan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Bandung, peneliti mencoba untuk menganalisa permasalahan tersebut melalui pendekatan teori Partisipasi Politik yang dikemukakan oleh Milbrath dalam Maran (2007:156) yang berperan cukup signifikan untuk mencapai optimalnya Partisipasi Politik Pemilih Pemula. Bentuk Partisipasi Politik tersebut terbagi menjadi 2 macam, Partisipasi Aktif (faktor pendorong partisipasi terbagi 5 macam) dan Partisipasi Pasif (faktor

penghambat partisipasi terbagi 3 macam), berikut uraiannya:

1. Perangsang Politik
2. Karakteristik Pribadi Seseorang
3. Karakteristik Sosial
4. Situasi atau Lingkungan politik
5. Pendidikan Politik

Dari dua faktor utama yang dikatakan Milbrath, terdapat factor penghambat juga yang mendorong orang tidak berpartisipasi politik, unsur yang ada dalam faktor penghambat tersebut yaitu:

1. Kebijakan induk yang selalu berubah
2. Pemula yang otonom
3. Dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk menyukseskan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa proses Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018 merupakan wujud dari demokrasi ditingkat daerah dimana daerah dapat memilih pemimpinnya dengan langsung, Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2018, *euphoria* politik mulai terasa pada tahun 2018 karena hampir seluruh daerah di Indonesia melaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan setelah pelaksanaan itu pada tahun 2019 akan dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 dan Anggota Legislatif tingkat pusat dan daerah. *Euphoria* tersebut nampaknya tidak terasa untuk Pemilih Pemula Kota Bandung, pasalnya dari 1.704.341 Daftar Pemilih Tetap suara yang sah 1.266 830 suara, suara tidak sah 39.042 dan suara tidak terpakai 398.475 suara, dari suara yang tidak terpakai disumbang oleh mayoritas Pemilih Pemula.

Dalam Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018 Sesuai dengan tahapan yang disampaikan oleh Milbrath dalam Maran (2007:156), dalam partisipasi ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Pada faktor pendukung yang pertama ialah Rangsangan Politik, dimana Rangsangan

Politik sangat berperan untuk membuat Pemilih khususnya Pemilih Pemula berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018, Rangsangan yang dilakukan oleh Partai Politik, Pemerintah Kota Bandung Melalui Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dan Komisi Pemilihan Kota Bandung hanya menjelang pemilihan dengan waktu yang tidak lama, strategi yang kurang tepat dan tidak berkelanjutan mengakibatkan tidak maksimalnya rangsangan politik tersebut hingga pada akhirnya Pemilih Pemula tidak merasakan Rangsangan Politik dari instansi-instansi tersebut. Hal tersebut membuat Pemilih Pemula tidak berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018 karena rangsangan yang tidak mereka dapat, namun jika rangsangan ini dilakukan secara berkelanjutan, merata dan tepat sasaran sangat besar peluang Pemilih Pemula Dapat berpartisipasi.

Faktor pendukung yang kedua ialah Karakteristik Pribadi Seseorang, dimana Karakter Pribadi ini berperan untuk membuat Pemilih khususnya Pemilih Pemula berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018. Partai Politik, Pemerintah Kota Bandung Melalui Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dan Komisi Pemilihan Kota Bandung mencoba membantu membangun Karakter pribadi tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang mereka buat untuk membangun kepedulian masyarakat seperti kepedulian terhadap sosial, budaya, hukum dan politik, sayangnya kegiatan itu masih minim dan belum merata. Karakteristik Pribadipun pada akhirnya tidak berpengaruh terhadap partisipasi terutama pada Pemilih Pemula, bagi mereka kepedulian mereka terhadap sosial, budaya, hukum dan politik tidak mendorong untuk berpartisipasi.

Faktor pendukung yang ketiga ialah Karakteristik Sosial, dimana Karakter Sosial ini berperan untuk membuat Pemilih khususnya Pemilih Pemula

berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018. Karakteristik Sosial terdiri dari karakter sosial, karakter ekonomi, karakter ras, dan agama. Partai Politik, Pemerintah Kota Bandung Melalui Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dan Komisi Pemilihan Kota Bandung mencoba membangun Karakter Sosial tersebut mencoba dibangun untuk terwujudnya kondusifitas kota atau rukunya kehidupan bermasyarakat di Kota Bandung melalui kegiatan-kegiatan yang mereka buat, sayangnya kegiatan itu masih minim dan belum merata. Karakteristik Sosial pada akhirnya tidak berpengaruh terhadap partisipasi terutama pada Pemilih Pemula, bagi mereka karakter sosial, karakter ekonomi, karakter ras, dan agama tidak mendorong untuk berpartisipasi.

Faktor pendukung yang keempat ialah Situasi atau Lingkungan Politik itu Sendiri, dimana Karakter Sosial ini berperan untuk membuat Pemilih khususnya Pemilih Pemula berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018. Karakteristik Sosial terdiri dari karakter sosial, karakter ekonomi, karakter ras, dan agama. Partai Politik, Pemerintah Kota Bandung Melalui Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dan Komisi Pemilihan Kota Bandung mencoba membangun Karakter Sosial tersebut untuk terwujudnya kondusifitas kota atau rukunya kehidupan bermasyarakat di Kota Bandung melalui kegiatan-kegiatan yang mereka buat, sayangnya kegiatan itu masih minim dan belum merata. Karakteristik Sosial pada akhirnya tidak berpengaruh terhadap partisipasi terutama pada Pemilih Pemula, bagi mereka karakter sosial, karakter ekonomi, karakter ras, dan agama tidak mendorong untuk berpartisipasi.

Faktor pendukung yang kelima ialah Pendidikan Politik, Pendidikan Politik berperan untuk membuat Pemilih khususnya Pemilih Pemula berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018. Pendidikan Politik terbagi

menjadi dua yaitu Pendidikan Politik Internal dan Pendidikan Politik Eksternal, Pendidikan Politik Internal didapat di lingkungan Pemilih, seperti dari keluarga, sekolah atau universitas dan dari organisasi yang pemilih ikuti, untuk Pendidikan Politik Eksternal didapat diluar lingkungan Pemilih seperti dari Partai Politik, Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum dan dari Lembaga-Lembaga Politik lain diluar dari Lingkungannya. Partai Politik, Pemerintah Kota Bandung Melalui Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dan Komisi Pemilihan Kota Bandung melakukan program dan kegiatan Pendidikan Politik, sayangnya kegiatan itu hanya menjelang Pemilihan saja, tidak dibuat secara berkelanjutan dan tidak merata. Pendidikan Politik Eksternal seharusnya dilakukan secara terprogram dan berkelanjutan dan harus memiliki capaian target perbulan atau pertahunnya dan diselenggarakan secara merata karena melalui Pendidikan Politik faktor pendukung terpenting untuk masyarakat khususnya Pemilih Pemula untuk berpartisipasi, jika ini dilakukan besar kemungkinan Pemilih Pemula akan berpartisipasi dengan baik dalam berpolitiknya terlebih dalam hal Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018.

Selain faktor pendukung agar masyarakat khususnya Pemilih Pemula berpartisipasi aktif ada faktor penghambat yang membuat partisipasi masyarakat khususnya Pemilih Pemula menjadi pasif bahkan golput, ada tiga faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama ialah Kebijakan Induk Organisasi Selalu Berubah, Kebijakan Induk Organisasi Selalu Berubah mengakibatkan Pemilih khususnya Pemilih Pemula enggan berpartisipasi, hal ini biasanya disebabkan atas berubah-ubahnya dukungan kepada calon dari satu calon ke calon lainnya atau yang awalnya memberi dukungan tiba-tiba tidak memberi

dukungan kepada calon manapun. Pemerintah Kota Bandung Melalui Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dan Komisi Pemilihan Kota Bandung berkoordinasi dengan organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok tersebut agar mereka dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan dapat berkontribusi terhadap partisipasi politik itu sendiri, sayangnya koordinasi dilakukan dengan organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok yang besar dan legal secara hukum tidak dengan komunitas-komunitas yang secara basis pengaruhnya besar ditingkat anak muda. Kebijakan Induk Organisasi Selalu Berubah pada akhirnya tidak berpengaruh terhadap partisipasi terutama pada Pemilih Pemula, bagi mereka yang ikut disebuah organisasi atau komunitas tidak ada kebijakan politik yang praktis dalam dukungan kepada calon yang wajib untuk diikuti.

Faktor penghambat yang kedua ialah Pemilih Pemula yang Otonom, Pemilih Pemula yang Otonom mengakibatkan Pemilih khususnya Pemilih Pemula enggan berpartisipasi, hal ini dapat disebabkan gerakan politik yang tidak independen dan Pemilih berada dalam hubungan suatu organisasinya. Pemerintah Kota Bandung Melalui Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dan Komisi Pemilihan Kota Bandung melakukan pendekatan salah satunya melalui komunikasi, komunikasi yang dilakukan dengan organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok tersebut agar mereka dapat berpartisipasi dengan baik terlepas dari mereka memilih salah satu calon ataupun yang belum memiliki dukungan terhadap salah satu calon, yang terpenting organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok tersebut dapat ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018, sayangnya pendekatan melalui komunikasi dilakukan dengan organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok yang

besar dan legal secara hukum tidak dengan komunitas-komunitas yang secara basis pengaruhnya besar ditingkat anak muda. Pada akhirnya komunikasi tersebut tidak berpengaruh terhadap partisipasi terutama pada Pemilih Pemula, bagi mereka yang ikut disebuah organisasi atau komunitas tidak ada kewajiban untuk memilih kepada anggotanya karena pilihan itu hak bukan kewajiban dan gerakan politik mereka memang independen tidak terpengaruhi oleh pihak manapun.

Faktor penghambat yang ketiga ialah Dukungan yang kurang dari Induk untuk mensukseskan, Dukungan yang kurang dari Induk untuk mensukseskan mengakibatkan Pemilih khususnya Pemilih Pemula tidak berpartisipasi, hal ini dapat menghambat aktivitas politik masyarakat khususnya Pemilih Pemula dan komunikasi yang buruk dari pihak peserta, penyelenggara dan pemerintah kepada masyarakat membuat kurangnya tingkat partisipasi pada Pemilih Pemula. Pemerintah Kota Bandung Melalui Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dan Komisi Pemilihan Kota Bandung melakukan beberapa kegiatan yang mengarah kepada sosialisasi untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018, sayang kegiatan – kegiatan itu tidak lakukan secara maksimal maka kegiatan tersebut tidak dirasakan oleh Pemilih Pemula, jika kegiatan itu dilakukan dengan maksimal besar kemungkinan Pemilih Pemula dapat berpartisipasi dan menggunakan hak politiknya dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti menemukan pengembangan model mengenai Partisipasi Politik Pemilih Pemula dengan pendekatan teori Milbrath dalam Maran (2007:156) menyebutkan dua faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, bahwa adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang sangata berpengaruh untuk pemilih pemula khususnya di Kota Bandung.

Pengembangan model Partisipasi Politik Pemilih Pemula khususnya di Kota Bandung terdapat dua faktor utama yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor pendukung seseorang untuk berpartisipasi terdiri dari 3 unsur yaitu:

1. Perangsang Politik
2. Pendidikan Politik
3. Figur Politik

Selain faktor pendukung, terdapat faktor penghambat seseorang tidak berpartisipasi politik, faktor penghambat seseorang untuk berpartisipasi terdiri dari 2 unsur yaitu :

1. Dukungan yang Kurang dari Induk Organisasi untuk Mensukseskan
2. Ketidak Percayaan terhadap Politik.

6. Simpulan dan Saran

5.1. Simpulan

1. Dari fakta yang terjadi di lapangan, Partai Politik, Pemerintah Kota Bandung melalui Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung melakukan program dan kegiatan yang mencakup ke delapan unsur tersebut pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018 meski jauh dari kata optimal dan tidak berkelanjutan.
2. Faktor pendukung pertama yaitu Perangsang Politik, Partai Politik, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dan Komisi Pemilihan umum Kota Bandung secara umum melakukan sosialisasi menjelang pemilihan, dengan rangsangan politik yang hanya menitik beratkan sosialiasi. Kurang optimalnya kegiatan tersebut membuat pemilih pemula tidak merasakan rangsangan politik.
3. Faktor pendukung kedua yaitu Karakteristik Pribadi Seseorang, Partai Politik, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dan Komisi Pemilihan umum Kota Bandung secara umum melakukan Pembangunan Karakteristik Pribadi

- kepada masyarakat. Untuk kepedulian sosial budaya, hukum dan politik tidak berpengaruh terhadap partisipasi politik, karena kepedulian yang mereka rasa tidak ada hubungannya dengan suara mereka pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018 khususnya Pemilih Pemula.
4. Faktor pendukung ketiga yaitu Karakter Sosial, Partai Politik, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dan Komisi Pemilihan umum Kota Bandung secara umum telah melakukan pendekatan terhadap karakteristik sosial kepada masyarakat, pendekatan tersebut menyentuh status sosial, status ekonomi, kelompok ras dan agama. Namun program dan kegiatan yang dilakukann oleh instansi-instansi tersebut tidak berpengaruh kepada pemilih pula untuk berpartisipasi secara praktis dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018, karena bagi pemilih pemula karakteristik sosial mencakup status sosial, status ekonomi, kelompok dan agama tidak berpengaruh kepada hak pilih mereka, bagi mereka suara mereka tidak dapat dipengaruhi oleh hal tersebut.
 5. Faktor pendukung keempat yaitu Situasi atau lingkungan Politik itu Sendiri, Partai Politik, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dan Komisi Pemilihan umum Kota Bandung secara umum telah melakukan koordinasi terkait situasi atau lingkungan politik dengan bebrapa pihak keaman yaitu TNI dan POLRI. Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kondusivitas dan memeberi rasa aman, namun program dan kegiatan yang dilakukann oleh instansi-instansi tersebut tidak berpengaruh kepada pemilih pemula untuk berpartisipasi secara praktis, karena bagi pemilih pemula situasi atau lingkungan politik yang kondusif bahkan aman tidak membuat mereka untuk datang ke TPS dan mempergunakan hak pilihnya.
 6. Faktor pendukung kelima yaitu Pendidikan Politik, Partai Politik, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dan Komisi Pemilihan umum Kota Bandung secara umum telah melaksanakan program dan kegiatan Pendidikan Politik kepada seluruh masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak menyentuh pemilih pemula, jika pendidikan politik dilakukan secara berjangka dan secara merata setidaknya akan berpengaruh terhadap partisipasi khususnya Pemilih Pemula melaui pendekatan-pendekatan yang lebih disukai Pemilih Pemula.
 7. Faktor penghambat pertama yaitu Kebijakan Induk Organisasi yang Selalu Berubah, Partai Politik, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dan Komisi Pemilihan umum Kota Bandung secara umum melakukan pendekatan berupa konsolidasi kepada organisasi atau kelompok yang ada di Kota Bandung. Upaya yang dilakukan instansi-instansi terkait nampaknya berbeda dengan organisasi-organisasi Pemilih Pemula yang mereka ikuti, organiasi yang mereka ikuti tidak berperan dalam politik praktis, oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh instansi-instansi tersebut tidak bepengaruh kepada oraganiasi, kelompok atau komunitas yang mereka ikuti.
 8. Faktor penghambat kedua yaitu Pemilh Pemula yang Otonom, Partai Politik, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dan Komisi Pemilihan umum Kota Bandung secara umum melakukan konsolidasi

kepada organisasi-organisasi yang ada di Kota Bandung. Upaya yang dilakukan instansi-instansi terkait tidak melibatkan organisasi-organisasi pemilih pemula yang mereka ikuti, organisasi yang mereka ikuti tidak berperan dalam politik praktis, oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh instansi-instansi tersebut tidak berpengaruh kepada organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas yang mereka ikuti.

9. Faktor penghambat ketiga yaitu Dukungan yang Kurang dari Induk Organisasi untuk Mensukseskan, Partai Politik, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dan Komisi Pemilihan umum Kota Bandung secara umum berupaya untuk mensukseskan Pemilihan Kepala daerah Kota Bandung 2018, namun dukungan yang berupa program dan kegiatan tersebut tidak dirasakan oleh sebagian besar pemilih khususnya pemilih pemula, komunikasi politik yang tidak berjalan lancar sebagaimana seharusnya mengabdikan Pemilih Pemula minim akan informasi pelaksanaan, informasi calon dan informasi visi dan misi dari para calon tersebut. Terlebih lagi ketidakmaksimalan tersebut datang langsung dari instansi-instansi terkait sebagai unsur penting dalam pesta demokrasi dalam hal ini Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018 untuk mendorong masyarakat berpartisipasi.
10. Dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018 tingkat partisipasi masyarakat belum maksimal ini terbukti dengan masih adanya suara tidak sah dan suara yang tidak terpakai, melalui pendekatan teori partisipasi politik menurut Milbrath dalam Maran (2007:156) peneliti menemukan

pengembangan model partisipasi pemilih pemula di Kota Bandung.

Hasil analisis temuan berupa pengembangan model yaitu dalam faktor pendukung, dalam faktor pendukung yang berpengaruh terhadap Pemilih Pemula adalah Rangsangan Politik dan Pendidikan Politik, sedangkan untuk Karakteristik Pribadi Seseorang, Karakter Sosial dan Situasi atau Lingkungan Politik tidak menjadi faktor pendukung bagi Pemilih Pemula di Kota Bandung. Berdasarkan hasil temuan ada faktor pendukung untuk Pemilih Pemula untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018 yaitu Figur Politik, Figur Politik terdiri dari latar belakang pendidikan, latar belakang prestasi, rekam jejak calon, karakter calon dan visi misi calon tersebut apakah mewakili para Pemilih Pemula atau tidak.

Dalam faktor penghambat yang berpengaruh terhadap Pemilih Pemula adalah Dukungan yang Kurang dari Induk Organisasi untuk Mensukseskan, sedangkan untuk Kebijakan Induk yang Selalu Berubah dan Pemula yang Otonom tidak menjadi faktor penghambat bagi Pemilih Pemula di Kota Bandung Berdasarkan hasil temuan ada faktor penghambat untuk Pemilih Pemula untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018 yaitu Ketidakpercayaan terhadap Politik terdiri dari adanya ketidakpercayaan terhadap partai politik dan adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintahan sebelumnya.

Untuk pengembangan model Partisipasi Politik Pemilih Pemula terdapat dua faktor utama yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor pendukung seseorang untuk berpartisipasi terdiri dari 3 unsur yaitu:

1. Perangsang Politik
2. Pendidikan Politik
3. Figur Politik

Selain faktor pendukung, terdapat faktor penghambat seseorang tidak

berpartisipasi politik, faktor penghambat seseorang untuk berpartisipasi terdiri dari 2 unsur yaitu:

1. Dukungan yang Kurang dari Induk Organisasi untuk Mensukseskan
2. Ketidak Percayaan terhadap Politik.

5.2 Saran

5.2.1. Akademis

1. Dalam Model Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Bandung banyak pihak yang terlibat didalamnya, diantaranya Partai Politik, Pemerintah Kota Bandung dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat menguji pengembangan Model Partisipasi Politik Pemilih Pemula yang dibuat oleh peneliti berdasarkan hasil temuan.
 2. Diharapkan para peneliti khususnya para peneliti ilmu politik dapat menemukan teori yang baru mengenai partisipasi politik yang lebih modern dan lebih relevan dengan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. Bagi Partai Politik seharusnya memiliki program pendidikan politik secara internal maupun eksternal yang berkelanjutan tidak hanya menjelang pada saat pemilihan saja, Partai Politik seharusnya memiliki kriteria yang tepat untuk memilih kader yang akan maju dalam Pemilihan Umum khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah.
 2. Bagi Pemerintah Kota Bandung seharusnya melakukan program dan kegiatannya terkait sosial, budaya dan politik secara berkelanjutan dan merata, untuk masalah koordinasi organisasi - organasasi seharusnya Pemerintah Kota Bandung melalui Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung menysasar organisasi atau komunitas yang mayoritas anak muda Bandung salah satu contoh komunitas yang mayoritas anak muda dan

memiliki banyak sekali anggota adalah BCCF (Bandung Creative City Forum).

3. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung seharusnya melakukan pengetahuan mengenai Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung yang berupa sosialisasi secara masiv, merata dan mengkemas sosialisasi dengan cara yang lebih disukai oleh pemilih pemula.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- [1] B. Kurniadi, "International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Indonesia Political Development : Democracy , Political Parties in the Political Education Perspective," pp. 66–70, 2019.
 - [2] B. Kurniadi, "1. Isi Jurnal SOSPOL 2018 Vol. XXIII No. 1_compressed.pdf." Universitas Langlangbuana, Bandung, pp. 1–5, 2018.
- A, Rahman, H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999). *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga. Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan.
- A. D., Siti Irene. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*,. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Firmanzah. 2007. *Mengelola partai politik-komunikasi dan positioning ideologi*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Fuady, Munir. 2010. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Guba, EG. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- H.A.R Tilaar (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- J, Ross. 1967. *Personal Religious Orientation and Prejudice*. *Journal of Personality and Social. Allport*.
- Kurniadi, Budi (2018). Generasi Muda dalam Perspektif Etika Politik. *Sospol, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Diakses dari <http://journal.unla.ac.id/index.php/sospolunla/article/view/739>, pada 5 September 2019.
- Kurniadi, Budi (2019). Indonesia Political Development: Democracy, Political Parties in the Political Education Perspective. *International Journal Multicultural anda Multireligious Understanding*. Diakses dari <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/613> pada 5 September 2019.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, (1994). *Qualitative data analysis, 2 nd ed*. USA: Sage Publication.
- P.Anthonius Sitepu.2012.*Teori-teori politik*.Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Raga Maran, Rafael. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta Indonesia
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Aflabeta.
- Sugiyah, 2010, *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah*, Jakarta : Algifari.
- Syafie, Inu Kencana. 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama

B. Peraturan dan Perundang-undangan

- Undang - Undang No. tahun 2012 pasal 1 ayat 1 tentang Pemilu
- Undang – Undang No. 10 tahun 2008 pasal 20 tentang hak memilih warganegara Indonesia
- Undang - Undang No 7 tahun 2017 pasal 198 tentang hak memilih sebagai warga negara pemilih pemula.
- Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Pasal 198 ayat 1 dan 2 serta Pasal 199 tentang Pemilu
- Undangng Undang No. tahun 2012 pasal 1 ayat 1 tentang Pemilu